

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat banyak sekali lembaga keuangan yang tujuannya untuk menghimpun atau menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Persebaran berbagai lembaga keuangan tersebut juga cukup luas, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu bank, koperasi, serta non bank/non koperasi (Baskara, 2013). Namun, pada prakteknya banyak sekali bentuk lembaga keuangan dengan sebutan yang berbeda-beda di tiap wilayah. Dengan keberagaman bentuk lembaga keuangan, masyarakat dituntut cerdas dalam memilih. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah peraturan yang jelas. Oleh karena itu, lembaga seperti bank dan koperasi menjadi pilihan utama seiring adanya peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan lembaga tersebut.

Salah satu lembaga keuangan yang populer adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan

kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip kerja BPR mengandalkan kecepatan dan kemudahan namun tetap memakai asas kehati-hatian perbankan. Prosedur di BPR lebih cepat dan mudah karena struktur organisasi yang lebih ramping dan pendek daripada bank umum (Herli, 2013).

Segmen pasar BPR lebih banyak pada pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, prospek perkembangan BPR ke depan sangatlah luas karena jumlah pelaku UKM sangat besar dan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Perkembangan jaringan kantor BPR:

Jaringan Kantor	2010	2011	2012
Kantor Pusat	1.706	1.669	1.653
Kantor Cabang	1.088	1.223	1.329
Kantor Kas	1.116	1.280	1.443
Total	3.910	4.172	4.425

(sumber: Bank Indonesia)

Secara keseluruhan, jumlah BPR setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk kantor pusat BPR, tingkat pertumbuhan jumlah BPR selama 2010 sampai dengan 2012 memang menurun. Berkurangnya jumlah kantor pusat disebabkan adanya beberapa BPR yang likuidasi dan dicabut izinnya oleh otoritas terkait, selain itu juga disebabkan adanya *merger* antar BPR.

Penurunan jumlah kantor pusat tersebut bertolakbelakang dengan kantor cabang dan kantor kas yang terus meningkat jumlahnya. Hal itu menunjukkan jika peluang bisnis BPR masih sangat positif dan terus berkembang.

Banyak bank umum tergiur untuk masuk dan merebut pangsa pasar BPR dengan cara mendirikan kantor cabang pembantu mikro yang fokus kegiatannya hampir mirip dengan BPR. Dengan “kacamata” bank umum yang penuh aturan prosedural bank besar di pangsa pasar mikro, tentu usaha mereka tidak akan lancar. Itulah sebabnya ada keyakinan bahwa BPR mempunyai prospek yang bagus di masa mendatang (Herli, 2013).

Latar belakang berdirinya bank adalah adanya pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Nasabah sebagai pihak yang kelebihan dana perlu rasa aman dalam menghimpun dana mereka. Tentu saja diharapkan postulate *going concern* benar-benar terwujud pada entitas semacam ini. Apalagi pada tahun 2011 terjadi kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp 40 miliar yang dilakukan oleh Melinda Dee, karyawan Citibank, salah satu bank swasta di ibukota. Modus yang digunakan Melinda yaitu dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah (Tarigan, 2011). Belum lagi kasus Bank Century yang merusak nama perbankan dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus Bank Century bahkan menyeret para petinggi Bank Indonesia dan menurunkan kredibilitas para regulator tersebut.

Bank Indonesia mewajibkan semua BPR untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar akuntansi keuangan. Dengan penggunaan standar akuntansi tersebut, laporan

keuangan yang dihasilkan BPR akan lebih relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan antar periode atau antar entitas sejenis (perbankan). Selain itu, penggunaan SAK ETAP akan memudahkan pihak yang menyusun laporan keuangan karena standar akuntansi ini lebih sederhana dari pada standar yang berlaku umum PSAK.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi yang benar, akan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan (Kasmir, 2008). Analisis laporan keuangan umumnya menggunakan rasio-rasio keuangan, rasio-rasio keuangan tersebut merupakan perbandingan antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antarlaporan keuangan.

Untuk perbankan, rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dengan melihat tingkat kesehatan bank, akan memberikan gambaran bagaimana operasi suatu bank dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi cukup penting bagi nasabah yang berniat menyimpan dananya agar tidak sembarang dalam memilih bank. Ditambah kasus-kasus seperti yang dijelaskan di atas telah merugikan dunia perbankan Indonesia serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga akan menurunkan tingkat simpanan di bank. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kesehatan bank yang diharapkan menggambarkan kondisi bank pada periode tertentu dapat mengembalikan kepercayaan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), dan likuiditas (*Liquidity*) atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. Penilaian kesehatan bank dibagi menjadi empat kriteria yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Lampung sendiri tercatat sebagai salah satu dari sembilan provinsi di mana BPR Konvensional berhasil menghimpun dana rata-rata diatas 1 triliun dalam 6 bulan (September 2012 hingga Maret 2013). Bahkan dalam urusan menghimpun dana ini, Lampung menjadi yang terbaik dengan jumlah hanya 26 BPR pada akhir Maret 2013, Lampung berhasil menghimpun dana sebesar Rp 3,29 triliun.

Bandingkan dengan Jawa Tengah dengan jumlah 259 BPR yang menghimpun dana Rp 10,69 triliun (Jayaprana, 2013).

Namun berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2010, terdapat dua Bank Perkreditan Rakyat di Lampung yang dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu BPR Tripanca Setiadana dan BPR Musajaya Arthadana. Untuk itu, selain melihat kondisi kesehatan bank juga diperlukan analisis terhadap prediksi kegagalan usaha (kebangkrutan) terhadap bank-bank tersebut. Hasil analisis dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja dan mengambil keputusan terkait kelangsungan usaha bank.

Salah satu model untuk menganalisis prediksi kegagalan usaha suatu perusahaan adalah analisis *Z-score* yang dikembangkan oleh Altman (1968). Dengan menggunakan rasio keuangan, Altman mengembangkan analisis yang dapat memprediksi kegagalan usaha perusahaan di masa yang akan datang. Analisis pada model *Z-score* menggunakan lima rasio keuangan, yaitu *net working capital to total asset*, *retained earning to total asset*, *earning before interest and tax to total asset*, *market/book value of equity to debt*, dan *sales to total asset*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “***Analisis Tingkat Kesehatan dan Prediksi Kegagalan Usaha Bank Perkreditan Rakyat di Bandar Lampung***”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat di Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan CAMEL?
2. Bagaimana model Altman dalam memprediksi kegagalan usaha pada bank perkreditan rakyat di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat di Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan CAMEL.
2. Mengetahui bagaimana model Altman dalam memprediksi kegagalan usaha pada bank perkreditan rakyat di Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak bank dan manajemen, khususnya untuk memberikan informasi mengenai kemungkinan kegagalan usaha pada waktu yang akan datang agar dapat mengambil langkah strategis dalam melakukan penyelamatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi berbagai pihak dan juga sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.